

RINGKASAN

Muhammad Pasya Fitra **JAMINAN PENANGGUHAN PENAHANAN
DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PENCURIAN DI POLRES ACEH TENGAH**
200510280 **(Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H dan
Nuribadah, S.H.,M.H)**

Penangguhan penahanan adalah upaya untuk mengeluarkan tersangka sebelum waktu penahanannya selesai. Ini merupakan salah satu cara untuk melindungi hak asasi manusia, di mana seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa yang ditahan dapat mengajukan permohonan agar penahanannya ditunda. Pada penangguhan penahanan, seorang tahanan masih sah dan resmi serta masih berada dalam batas waktu penahanan yang dibenarkan undang-undang. Namun pelaksanaan penahanan dihentikan dengan jalan mengeluarkan tahanan setelah instansi yang menahan menetapkan syarat-syarat penangguhan yang harus dipenuhi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penangguhan penahanan terhadap tersangka perkara pencurian di Polres Aceh Tengah dan apa yang menjadi kendala serta upaya jaminan penangguhan penahanan terhadap tersangka perkara pencurian di Polres Aceh Tengah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan penangguhan pada tindak pidana pencurian di Polres Aceh Tengah dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Adapun Kendala Tersangka Atau Terdakwa Tidak Dapat Memenuhi Syarat Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Orang upaya yang dilakukan dengan cara misalnya membantu membuat berkas pengajuan penagguhan penahananan karena kebanyakan klien tidak mengerti bahasa hukum dalam surat pengajuan permohonan penangguhan penahananan, Kendala penyidik, penuntut umum dan hakim yang Tidak Percaya dengan Tersangka atau Terdakwa upaya yang dilakukan dengan melakukan perundingan dengan Tersangka atau Terdakwa sebelum melakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dari tingkat penyidikan, Penuntutan maupun pengadilan oleh hakim.

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti Dalam rangka penegakan hukum yang mewujudkan kepastian hukum, aparat kepolisian Polres Aceh Tengah harus memberikan pertimbangan yang cermat terhadap permohonan penangguhan penahanan yang dilakukan tersangka ataupun kuasa hukumnya.

Kata Kunci: Jaminan, Penangguhan Penahanan, Pencuri

SUMMARY

Muhammad Pasya Fitra **GUARANTEED SUSPENSION OF
DETENTION IN RESOLVING THEFT IN
POLRES ACEH TENGAH**
200510280
**(Dr. Joelman Subaidi, S.H.,M.H and
Nuribadah, S.H.,M.H)**

Suspension of confinement is a work to eliminate a suspect before their detainment time is finished. This is one method for safeguarding basic liberties, where somebody who is a suspect or respondent who is being confined can present a solicitation to have their detainment delayed. During a suspension of confinement, a prisoner is as yet legitimate and official and is still inside the detainment period allowed by regulation. In any case, the execution of confinement is come by delivering the prisoner after the keeping organization decides the details of the suspension that should be satisfied.

This exploration plans to figure out how to suspend detainment for suspects in burglary cases at the Focal Aceh Police and what are the snags and endeavors to ensure the suspension of confinement for suspects in robbery cases at the Focal Aceh Police.

This exploration utilizes a subjective strategy with an observational juridical methodology, which all in all is a kind of humanistic lawful examination, in particular an exploration system that produces enlightening information as composed words or direct meetings with related parties.

The aftereffects of the exploration show that the execution of the suspension of criminal demonstrations of robbery at the Focal Aceh Police is completed by considering the arrangements of Unofficial law no. 27 of 1983 concerning the Execution of the Criminal Method Code. Aside from that, thought for suspension of detainment has likewise been carried out by satisfying emotional components which incorporate contemplations that the suspect or litigant will take off, harm or lose proof and dread that he will rehash the wrongdoing. The issue of specialists, public investigators and judges who don't really accept that the suspect or respondent can be overwhelmed by haggling with the suspect or litigant prior to completing an assessment did by the agent, public examiner and judge at the examination, indictment or preliminary level by the appointed authority.

There are ideas that can be given by analysts. With regards to policing makes lawful sureness, Focal Aceh Cops should give cautious thought to demands for suspension of confinement made by suspects or their legitimate delegates.

Keyword: Bail, Suspension of Confinement, Criminal